

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sangat penting melindungi masyarakat dari berbagai risiko bencana, termasuk banjir yang melanda wilayah daratan maupun pesisir. Keberadaan instansi yang menangani penanggulangan bencana sangat diperlukan agar upaya perlindungan yang diberikan negara kepada masyarakat dapat terlaksana secara maksimal.

Dalam upaya mitigasi banjir, pemerintah memiliki peran penting dalam menangani berbagai jenis bencana di Indonesia melalui pembentukan sebuah institusi khusus, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bergerak di tingkat pusat atau nasional. Selain itu, pemerintah juga membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berfungsi di tingkat provinsi serta kabupaten/kota (Harijoko, 2021).

BPBD memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan mitigasi. Ditinjau dari aspek kelembagaan maupun di luar struktur formal, yang mencakup berbagai unsur dan bidang terkait kegiatan seperti pemetaan tingkat kerawanan, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, penyebaran informasi terkait kesiapsiagaan, serta peningkatan kapasitas masyarakat.

Dalam penanganan bencana banjir, koordinasi BPBD dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap pra-bencana atau pencegahan yang berada di bawah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, tahap saat bencana atau tanggap darurat yang dikelola oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta tahap pasca-bencana atau pemulihan yang menjadi tanggung jawab Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Muzdalifah et al., 2023)

Landasan hukum bagi BPBD dalam menjalankan upaya mitigasi banjir tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa penanganan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2022 pasal 10 tentang unsur pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bintan, mencakup peran BPBD yang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 26 ayat (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana; b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Potensi Kerugian dan Kerusakan di Kabupaten Bintan

| Jenis Bahaya                 | Potensi Kerugian Jutaan Rupiah |                  |                |        | Potensi Kerusakan Lingkungan (HA) |        |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------|-----------------------------------|--------|
|                              | Kerugian Fisik                 | Kerugian Ekonomi | Total Kerugian | Kelas  | Kerusakan Lingkungan              | Kelas  |
| Banjir                       | 152.545                        | 221.265          | 373.810        | Tinggi | 2.046                             | Tinggi |
| Cyaca Ekstrim                | 1.585.603                      | 963.555          | 2.549.158      | Tinggi | -                                 |        |
| Gelombang ekstrim dan abrasi | 10.979                         | 7.414            | 18.393         | Tinggi | 188                               | Rendah |
| Kebakaran hutan dan lahan    | -                              | 590.378          | 590.378        | Tinggi | 4.520                             | Tinggi |
| Kekeringan                   |                                | 727.616          | 727.616        | Tinggi | 10.247                            | Tinggi |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2026

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa untuk seluruh bahaya memiliki kelas kerugian tinggi. Untuk potensi kerusakan terdapat 3 bahaya yang masuk kategori kelas tinggi yakitu bahaya banjir, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan sedangkan bahaya cuaca ekstrim dan gelombang ktrim dan abrasi masuk kategori kelas tinggi.

BPBD Kabupaten Bintan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan meliputi pelaksanaan kebijakan prabencana yang berfokus pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, BPBD berwenang merumuskan kebijakan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana, mengoordinasikan dan melaksanakan program bersama instansi atau lembaga terkait, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Selain itu, BPBD juga memiliki kewenangan melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut,

serta menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan guna memastikan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan berjalan efektif, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Bintan.

Banjir menjadi bencana yang paling dominan terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kejadian banjir hampir selalu terjadi setiap tahun di berbagai wilayah dengan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Banjir merupakan jenis banjir yang disebabkan oleh pasang air laut naik dan merendam daratan yang lebih rendah karena volume air melebihi kapasitas normal. (Erpani & Sya, 2024)

Banjir dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: banjir biasa (genangan), banjir bandang, dan banjir rob, yaitu banjir yang terjadi akibat naiknya permukaan air laut. (Rahim et al., 2023). Banjir yang menyebabkan genangan dalam jangka waktu lama, baik selama beberapa hari hingga berbulan-bulan, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, serta mengganggu keamanan dan kenyamanan permukiman. (Naidah Naing, 2014)

Penyebab banjir di Indonesia bersifat multidimensional. Faktor alami seperti curah hujan tinggi, kondisi topografi, dan kapasitas sungai yang terbatas menjadi pemicu utama. Namun demikian, faktor manusia turut berperan besar, seperti alih fungsi lahan, deforestasi, pembangunan yang tidak memperhatikan tata ruang, serta buruknya pengelolaan drainase.

Unsur alam yang berperan antara lain tingginya intensitas hujan, bentang wilayah yang relatif datar, serta karakteristik hidrologi yang turut menentukan pola dan arah aliran sungai. (Ni'matussyahara et al., 2022).

Banjir termasuk salah satu jenis bencana alam. (Syafitri & Rochani, 2021) Banjir terjadi ketika permukaan air laut naik akibat pengaruh pasang surut dan badai, sehingga daratan rendah di sekitar pantai terendam air laut. (Efendi et al., 2021). Banjir rob dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti iritasi kulit, diare, infeksi saluran pernapasan (ISPA), hingga demam berdarah dengue (DBD) yang berpotensi fatal. Karena dampak kesehatan tersebut, tidak mengherankan jika beberapa kejadian banjir rob sampai menimbulkan korban jiwa (Ghaza Khairunnisa, 2023)

Dalam praktiknya, mitigasi bencana di Indonesia mengalami berbagai dinamika. Di satu sisi, terdapat kemajuan dalam penguatan kelembagaan, regulasi, serta pemanfaatan teknologi seperti sistem peringatan dini dan pemetaan risiko. Namun di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, perubahan iklim juga memperburuk kondisi dengan meningkatkan ketidakpastian cuaca dan potensi kejadian ekstrem.

Berdasarkan inaRISK Badan Nasional Penanggulangan Bencana, nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Bintan Tahun 2025 adalah 117.22 (Kategori Tinggi) Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bintan di



Provinsi Kepulauan Riau menetapkan keadaan darurat bencana untuk jangka waktu dua minggu setelah banjir melanda beberapa kecamatan akibat hujan lebat yang terjadi selama dua hari berturut-turut. Penetapan status tersebut dilakukan berdasarkan laporan BPBD yang menyatakan bahwa sejumlah wilayah kecamatan terdampak banjir.

BPBD Kabupaten Bintan memegang peran penting dalam upaya mitigasi banjir, Menurut data BPBD Bintan, pada Januari 2023, sekitar 1.666 kepala keluarga (sekitar 3.306 jiwa) terdampak banjir di sembilan kecamatan. merincikan untuk korban banjir rob terdiri dari Kecamatan Bintan Timur sebanyak 235 KK. Terdiri dari 199 KK di Kelurahan Kijang Kota, Kelurahan Sei Enam 32 KK, Kelurahan Gunung Lengkuas 4 KK sementara Kelurahan Sei Lekop sedang menunggu pendataan.

Kecamatan Bintan Utara 365 KK terdiri dari Kelurahan Tanjunguban Kota 359 KK, Kelurahan Tanjunguban Selatan 3 KK, dan Kelurahan Tanjunguban Utara 3 KK. Kecamatan Teluk Sebong sebanyak 61 KK meliputi Kelurahan Kota Baru 13 KK, Desa Ekan Aculai 17 KK, Desa Sri Bintan 26 KK, dan Desa pengudang 5 KK. Kecamatan Seri Kuala Lobam 114 KK terdiri dari Desa Teluk sasah 30 KK, Kelurahan Teluk lobam 8 KK, Kelurahan Tanjung permai 1 KK, Desa Kuala Sempang 28 KK, dan Desa Busung 47 KK.

Kecamatan Gunung Kijang 47 KK terdiri dari Kelurahan Kawal 28 KK dan Desa Gunung Kijang 19 KK. Lalu Kecamatan Teluk Bintan 414

KK terdiri dari Kelurahan Tembeling Tanjung 115 KK, Desa Bintan Buyu 69 KK, Desa Penaga 55 KK, Desa Pengujan 72 KK, Desa Pangkil 2 KK, dan Desa Tembeling 101 KK. Kemudian Kecamatan Bintan Pesisir ada 161 KK terdiri dari Desa Kelong 49 KK, Desa Air Glubi 59 KK, Desa Numbing 53 KK, dan Desa Mapur proses pendataan. Kecamatan Mantang 268 KK meliputi Desa Mantang Lama 91 KK, Desa Dendun 79 KK, Desa Mantang Baru 23 KK, dan Desa Mantang Besar 75 KK serta Kecamatan Tambelan 1 KK.

BPBD secara aktif melakukan pencatatan korban dan kerugian, menyiapkan lokasi evakuasi seperti aula desa dan sekolah, serta mengadakan kegiatan gotong-royong bersama masyarakat untuk membersihkan daerah terdampak setelah banjir (Ismail, 2023). Selain itu, BPBD secara rutin mengeluarkan peringatan dini. Pada Juni 2023, BPBD Kabupaten Bintan mengingatkan masyarakat, khususnya di Bintan Utara dan Bintan Timur, untuk mewaspadaai kemungkinan pasang maksimum air laut berdasarkan prediksi BMKG. Peran BPBD menjadi sangat penting mengingat dampak nyata yang ditimbulkan oleh banjir. Berdasarkan catatan BPBD (Mujahidin, 2023).

Peran BPBD dalam memantau kondisi, memberikan peringatan dini, serta menyiapkan respons tanggap darurat sangat krusial untuk mencegah peningkatan jumlah korban dan meminimalkan kerusakan pada infrastruktur serta kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, masyarakat dapat lebih memahami risiko banjir

sekaligus mengetahui tindakan yang tepat dalam menanggulangnya.  
(Wulandari, 2022).

Tabel 1.2 Skenario kejadian bencana banjir tahun 2023

| NO. | Item                      | Isian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Waktu Kejadian            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akhir januari pada tanggal 23 januari 2023 dan 29 januaari 2023 disertai cuaca ekstrim</li> <li>2. Awal maret pada tanggal 03 maret 2023 disertai dengan cuaca ekstrim dan angin kencang</li> <li>3. Pertengahan juli pada tanggal 19 juli 2023</li> </ol>                                                                 |
| 2   | Lokasi                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan teluk bintang</li> <li>2. Kecamatan bintang utara</li> <li>3. Kecamatan telok sebong</li> <li>4. Kecamatan seri kuala lobam</li> <li>5. Kecamatan bintang timur</li> <li>6. Kecamatan gunung kijang</li> <li>7. Kecamatan toapaya</li> <li>8. Kecamatan mantang</li> <li>9. Kecamatan bintang pesisir</li> </ol> |
| 3   | Pemicu                    | Curah hujan di sertai dengan cuaca ekstrim dan pasang air laut                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4   | Bahaya Primer             | Air yang menggenang yang menyebabkan gangguan atas perumahan warga dan akses jalan untuk transportasi terhambat.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5   | Peringatan Dini           | Dikeluarkan oleh BPBD Bintang melalui aplikasi sistem-sistem peringatan dini                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6   | Cakupan Wilayah Terdampak | 9 kecamatan, 15 kelurahan dan 28 desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7   | Bahaya Sekunder           | Wabah penyakit kulit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8   | Bahaya Pendamping         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2026

Berdasarkan Tabel 1.1, kejadian banjir di Kabupaten Bintang pada tahun 2023 terjadi pada bulan Januari, Maret, dan Juli yang dipicu oleh



curah hujan, cuaca ekstrem, serta pasang air laut. Banjir tersebut berdampak pada sembilan kecamatan yang mencakup 15 kelurahan dan 28 desa, dengan bahaya utama berupa genangan yang mengganggu permukiman dan akses transportasi, sedangkan peringatan dini disampaikan oleh BPBD Kabupaten Bintan melalui Sistem Peringatan Dini..

Tabel 1.3 Potensi Luas Bahaya banjir Per Kecamatan Kabupaten Bintan 2025

| Kecamatan       | Bahaya  |        |        |       | Kelas  |
|-----------------|---------|--------|--------|-------|--------|
|                 | Luas HA |        |        |       |        |
|                 | Rendah  | Sedang | Tinggi | Total |        |
| Teluk bintang   | 558     | 401    | 147    | 1.107 | Rendah |
| Bintan utara    | 310     | 135    | 73     | 519   | Rendah |
| Telok sebong    | 1.099   | 532    | 259    | 1.890 | Rendah |
| Sri kuala lobam | 443     | 316    | 134    | 893   | Rendah |
| Bintan timur    | 3805    | 371    | 192    | 1.368 | Rendah |
| Gunung kijang   | 946     | 868    | 482    | 2.296 | Sedang |
| Toapaya         | 541     | 212    | 134    | 887   | Rendah |
| Tambelan        | 12      | 9      | 3      | 23    | Sedang |
| Total           | 4.714   | 2.845  | 1.423  | 8.982 | Sedang |

Sumber: KRB Kabupaten Bintan Tahun 2022-2026

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Bintan Tahun 2022–2026, total luas potensi bahaya banjir di Kabupaten Bintan mencapai 8.982 ha yang tersebar pada delapan kecamatan dengan klasifikasi bahaya rendah, sedang, dan tinggi. Kecamatan Gunung Kijang memiliki luas potensi bahaya banjir terbesar, yaitu 2.296 ha yang terdiri atas 946 ha pada kelas bahaya rendah, 868 ha pada kelas bahaya sedang, dan 482 ha pada kelas bahaya tinggi. Selanjutnya, Kecamatan Teluk Sebong memiliki luas potensi bahaya banjir sebesar 1.890 ha, sedangkan Kecamatan Bintan Timur berada pada urutan ketiga dengan luas potensi bahaya banjir sebesar 1.368 ha yang terdiri atas 805 ha pada kelas bahaya rendah, 371 ha pada kelas bahaya sedang, dan 192 ha pada kelas bahaya tinggi. Sementara

itu, Kecamatan Tambelan merupakan wilayah dengan luas potensi bahaya banjir yaitu 23 ha kelas sedang.

Kecamatan Gunung Kijang memiliki potensi luas bahaya banjir terbesar, yaitu 2.296 ha, sehingga dikategorikan dalam kelas bahaya sedang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan telah mitigasi berupa Penyusunan Peta Risiko dan Rencana Penanggulangan Bencana merumuskan serta memperbarui dokumen tata ruang dan peta wilayah rawan bencana, yang memuat Kecamatan Gunung Kijang ke dalam zona prioritas mitigasi banjir untuk meminimalisir dampak kerugian dan Pembentukan Perempuan Tangguh Bencana BPBD yang di bentuk pada haari rabu 18 oktober 2023, program tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana dan belum secara khusus difokuskan pada mitigasi banjir. Berdasarkan hasil konfirmasi pihak BPBD Kabupaten Bintan, hingga saat ini Kecamatan Gunung Kijang belum menjadi wilayah yang menjadi fokus pelaksanaan program mitigasi banjir. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan lebih bersifat umum dalam peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, bukan sebagai program mitigasi banjir yang terencana dan berkelanjutan. Kecamatan Bintan Timur merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta sering mengalami banjir berulang merupakan wilayah yang secara berulang mengalami banjir dan memiliki karakteristik permasalahan yang kompleks, seperti tingginya curah hujan, kapasitas drainase yang belum memadai, keberadaan kolam retensi yang belum berfungsi optimal, serta terhambatnya aliran pembuangan menuju laut akibat perkembangan

permukiman di Kawasan, kondisi tersebut menyebabkan dampak banjir tidak hanya dirasakan oleh permukiman, tetapi juga mengganggu aktivitas, transportasi, dan pelayanan masyarakat.

Jika dilakukan perbandingan secara garis lurus semakin besar luasan bencana maka akan semakin besar pula potensi penduduk akan terpapar bencana terhadap jumlah penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi kepadatan penduduk, nilai kepadatan penduduk yang tinggi akan berada pada kawasan rawan bencana. Penduduk di Kabupaten Bintan sebanyak 161765 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Bintan dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 1.4 Jumlah penduduk kabupaten bintan tahun 2025

| No  | Kecamatan        | Total penduduk jiwa |
|-----|------------------|---------------------|
| 1.  | Bintan pesisir   | 7015                |
| 2.  | Bintan Timur     | 48371               |
| 3.  | Bintan Utara     | 24209               |
| 4.  | Gunung Kijang    | 16521               |
| 5.  | Mantang          | 4454                |
| 6.  | Seri kuala lobam | 18831               |
| 7.  | Tambelan         | 5431                |
| 8.  | Telok sebong     | 20267               |
| 9.  | Teluk Bintan     | 13326               |
| 10. | Toapaya          | 17442               |

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 2023-2027

Berdasarkan pada Tabel memperlihatkan bahwa di Kabupaten Bintan memiliki sebaran penduduk yang tidak merata. Diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bintan Timur dengan 48371 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Mantang 4454 jiwa. Peristiwa banjir

yang terjadi di Kecamatan Bintan Timur menunjukkan adanya peningkatan frekuensi dan dampak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan, seperti Kampung Pisang, Jalan Lintas Wacopek, dan kawasan Jalan depan PT Karet Kilometer 18, terendam banjir dengan ketinggian air mencapai dada orang dewasa. Data sementara menunjukkan sebanyak 189 kepala keluarga terdampak banjir yang tersebar di wilayah Kangboi, Sei Lekop, Gesek, dan Kampung Pisang. Kondisi tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat serta menimbulkan kerugian bagi warga yang berada di kawasan rawan banjir.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan peninjauan langsung ke Kampung Pisang, Kelurahan Kijang Kota, yang sebelumnya kembali terdampak banjir. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Bintan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bintan untuk segera menyusun langkah penanganan jangka pendek dalam waktu lima hari. Upaya yang direncanakan meliputi pembangunan kolam retensi, normalisasi Waduk Sei Datuk, serta perbaikan saluran drainase yang dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Langkah tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap penanganan banjir dari aspek infrastruktur, namun permasalahan banjir masih terus berulang.

Gambar 1.1 Peta Titik Rawan dan Kolam Retensi 2025





Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bintan tahun 2026

Kondisi tersebut kembali terjadi pada tahun 2024. Warga Kampung Pisang menyatakan bahwa sejak Desember 2023 hingga Januari 2024 telah terjadi banjir sebanyak dua kali. Meskipun telah dibangun waduk retensi, banjir masih sering terjadi dengan ketinggian air mencapai dua meter. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan mencatat bahwa pada tahun 2025 Kecamatan Bintan Timur sebanyak 288 KK dengan 744 jiwa terdampak banjir, dan satu KK terdampak angin kencang. terjadi dua kali peristiwa banjir, yaitu pada tanggal 10 Januari serta pada tanggal 19–20 Maret 2025, Kecamatan Bintan Timur Titik Rawan Utama berada di Kampung Pisang dan Kampung Sei Datuk (Kelurahan Kijang Kota), serta kawasan Jalan Wacopek. Kecamatan Teluk Sebong Total Terdampak 171 Kepala Keluarga (KK). Titik Rawan Utama: Kawasan pesisir Kelurahan Kota Baru dan wilayah permukiman dataran rendah rawan cuaca ekstrem. Kecamatan Gunung Kijang & Toapaya Total Terdampak 129 KK di Gunung Kijang dan 66 KK di Toapaya. Titik Rawan Utama berada Jalan Kampung Flores (Gunung Kijang) dan Jalan Gesek (Toapaya). Tingginya jumlah masyarakat terdampak menunjukkan bahwa banjir di Kecamatan Bintan Timur masih menjadi ancaman serius yang memerlukan upaya mitigasi yang lebih efektif.



Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari setelah BPBD Kabupaten Bintan melaporkan terjadinya banjir di sejumlah kecamatan akibat hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana, termasuk mitigasi banjir.

Mitigasi merupakan bagian dari tahap prabencana yang bertujuan mengurangi risiko serta dampak bencana melalui berbagai upaya, seperti pemetaan daerah rawan banjir, sosialisasi kepada masyarakat, penyusunan rencana kontingensi, koordinasi lintas sektor, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Pelaksanaan mitigasi menjadi sangat penting mengingat banjir di Kelurahan Kijang Kota terus berulang meskipun berbagai upaya fisik telah dilakukan.

Berdasarkan data tersebut, lokasi fokus penelitian berada Lokasi banjir di Kampung Pisang, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, umumnya berpusat di wilayah RT 002 / RW 007. Di area-area yang berpotensi tergenang dengan risiko terjadi bencana banjir, pihak terkait perlu mengambil langkah-langkah signifikan untuk menurunkan risiko tersebut. Upaya pengurangan risiko dapat dilakukan melalui perlindungan sebelum bencana (pra-bencana) dan pemulihan setelah bencana (pasca-bencana).

Dengan melakukan identifikasi wilayah rawan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, serta memperkuat sistem peringatan dini, BPBD diharapkan mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh banjir. Meski demikian, masih

diperlukan mendalam terkait risiko dan langkah-langkah mitigasi. Penelitian ini lebih berfokus pada analisis mengenai bagaimana upaya mitigasi banjir dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bintan, meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, kesadaran masyarakat, pelatihan dan pendidikan, dukungan sumber daya, serta sistem peringatan dini. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Mitigasi Banjir Di Kecamatan Bintan Timur Oleh Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Bintan Tahun 2025” (Studi Kasus Kelurahan Kijang Kota).

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Mitigasi Banjir Di Kecamatan Bintan Timur Oleh Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Bintan Tahun 2025” (Studi Kasus Kelurahan Kijang Kota).

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Mitigasi Banjir Di Kecamatan Bintan Timur Oleh Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Bintan Tahun 2025” (Studi Kasus Kelurahan Kijang Kota).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menghasilkan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebencanaan, mitigasi banjir, dan manajemen penanggulangan bencana. Kajian ini menyoroti analisis mitigasi non-struktural yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya mengurangi risiko banjir.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata. Penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis masalah secara ilmiah, sistematis, dan berbasis data, khususnya terkait isu kebencanaan dan mitigasi banjir di Kabupaten Bintan.

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah kegiatan menelaah berbagai literatur yang memiliki kaitan dengan topik penelitian. Melalui proses ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai permasalahan yang dikaji, metode atau pendekatan yang digunakan, serta temuan-temuan dari penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, tinjauan pustaka juga berperan untuk memperkuat landasan teori sekaligus memberikan arah yang jelas bagi penelitian, sehingga dapat menghindari pengulangan studi yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam penelitian (Yunus & Irnayanti, 2025) “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Pasca Bencana Banjir di Kota Cimahi”, fokus utamanya adalah menitikberatkan pada evaluasi peran BPBD dalam penanganan pasca-bencana dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Teori peran pemerintah digunakan dalam dimensi regulator, dinamisator, dan fasilitator untuk menilai efektivitas BPBD dalam memulihkan kondisi masyarakat setelah banjir, khususnya di Kelurahan Melong, Cimahi. Berbeda dengan penelitian tersebut, fokus penelitian ini adalah menganalisis strategi mitigasi bencana banjir di wilayah pesisir. Penelitian ini menyoroti upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Bintan dalam mengurangi risiko dan dampak